



Analisis Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Analysis of the Internal Control System for Providing People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Rakyat Indonesia)

Nurkhafifa*, Abdul Rijal, Hajrah Hamzah

Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
*Corresponding Author: khafifa7@gmail.com

Abstract

This research aims to evaluate the Control System over the Procedures of People's Business Credit Granting at Bank Rakyat Indonesia, Sinjai Branch, Tassililu Unit. The research variable encompasses internal controls over the granting of people's business credit. The study population includes the unit head, account officers, and customer service at Bank Rakyat Indonesia, Tassililu Unit, Sinjai Branch. The sample consists of reports on credit disbursement and related documents from the past three years, namely 2020, 2021, and 2022. Data collection is carried out through interview techniques and documentation. The data analysis technique employed is qualitative descriptive based on a review of credit granting according to Kasmir's theory (2014). The research findings indicate that in the process of granting people's business credit at Bank Rakyat Indonesia, Sinjai Branch, Tassililu Unit, there is compliance with the applicable Standard Operating Procedures, particularly in the stage of loan application document submission. However, there are some findings that need attention to enhance the effectiveness of the control system and ensure compliance with the existing procedures.

Keywords: Internal control, Procedure for granting People's Business Credit

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian atas Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu. Variabel penelitian ini mencakup pengendalian internal terhadap pemberian kredit usaha rakyat. Populasi penelitian melibatkan kepala unit, mantri, dan customer service di Bank Rakyat Indonesia Unit Tassililu. Sampel penelitian ini mencakup laporan tentang pemberian kredit dan dokumen-dokumen terkait selama tiga tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan tinjauan terhadap pemberian kredit menurut teori Kasmir (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pemberian kredit usaha rakyat di Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu, terdapat kesesuaian dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, terutama pada tahap pengajuan berkas pinjaman. Meskipun demikian, terdapat beberapa temuan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.

Kata Kunci: Pengendalian internal atas pemberian kredit



1. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian di Indonesia saat ini sudah sangat berkembang dari waktu ke waktu hal ini terjadi karena banyaknya faktor atau elemen pendukung yang berperan selama berjalannya perekonomian salah satu faktor pendukungnya adalah lembaga keuangan yaitu perbankan yang memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, karena kegiatan perekonomiannya sendiri sudah banyak didukung oleh berbagai produk, jasa maupun pelayanan perbankan lainnya yang memberikan berbagai kebutuhan kegiatan perekonomian Indonesia bahkan dunia, guna menciptakan transaksi ekonomi finansial yang efektif dan efisien (Fauzany & Haryono, 2021).

Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan semakin maju suatu negara maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut, artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat (Nulhakim, 2016).

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang berperan sebagai alat penggerak pertumbuhan dan penggerak ekonomi yang fungsinya tidak dapat dipisahkan oleh pembangunan Indonesia. Praktik perbankan di Indonesia, pemberian kredit pada umumnya di ikuti penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak dapat memberikan jaminan sulit untuk prosedur dalam pemberian kredit dimulai dari adanya pengajuan permohonan kredit dari masyarakat, proses analisis kredit, proses pencairan kredit, sampai dengan proses umpan balik pelaksanaan kredit, konsep prosedur dan kebijakan kredit ini mengikuti alur proses kredit itu sendiri maka harus didukung dengan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit kepada masyarakat dan diharapkan tidak menimbulkan kredit bermasalah dikemudian hari (Kadir W. et al., 2012) .

Semakin berkembangnya dunia perbankan Indonesia dan sebagai upaya mengatasi dampak negatif pemberian kredit, maka perlu dilakukan suatu pengendalian dibidang perkreditan. Pengendalian dibidang pengkreditan merupakan implementasi pengendalian intern yang diterapkan dalam perbankan khususnya dibidang pengkreditan tujuannya adalah untuk penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan bank di bidang perkreditan agar dapat dilakukan dengan baik serta dihindari adanya penyelewengan (Nurfika, 2016)(Rijal et al., 2020).

Bentuk pengendalian ini tidak hanya terlepas dari penjagaan saja, tetapi juga bagaimana agar usaha-usaha dibidang perkreditan tersebut agar dapat dihindarkan dari hal-hal yang boros baik waktu, tenaga ataupun dana. Untuk peningkatan efisiensi dan pengamanan terhadap harga tersebut, tentu administrasi pengkreditan harus padat diandalkan, sehingga harus ada pengaruh terlebih dahulu mengenai pengendalian.

Hasil dalam penelitian Ardillawati (2019). Mengenai pemberian kredit usaha rakyat yang dilakukan pada PT Bank Rakyat Indonesia Unit Karunrung Cabang Sinjai yang menunjukkan bahwa pemberian kredit usaha rakyat sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat karena tingkat signifikan kurang dari 0.05 maka pemberian kredit berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

2. DAFTAR PUSTAKA

Bank sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang. Menurut Kasmir (2014:24) (Hamzah & Sangkala, n.d.) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2014:24) Fungsi utama dari sebuah bank yaitu sebagai sarana penghimpunan dan penyaluran dana untuk masyarakat dengan tujuan guna mendukung pembangunan nasional dengan cara meningkatkan pembangunan serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Menurut Kasmir (2014:31) jenis-jenis bank terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu:

- Dilihat dari segi fungsinya
Jenis bank dilihat berdasarkan fungsinya dimana Bank pembangunan dan Bank tabungan berubah fungsinya menjadi Bank umum dan Bank perkreditan rakyat (BPR)
- Dilihat dari segi kepemilikannya
Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.
- Dilihat dari segi status
Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut, kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya.
- Dilihat dari segi cara menentukan harga
Jenis bank dilihat dari segi atau cara dalam dua kelompok harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah

Menurut Purnawati (2014:20-22) fungsi bank secara umum terbagi menjadi tiga yaitu:

- Menghimpun dana dari masyarakat
Bank menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan, untuk itu masyarakat akan mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dengan jaminan keamanan yang diberikan oleh pihak bank. Selain dari segi keamanan, tujuan masyarakat menyimpan dana di bank yaitu untuk berinvestasi, sebab bank akan memberikan keuntungan berubah tingkat pengembalian retribusi yang akan diperoleh nasabah berdasarkan kebijakan bank bersangkutan.
- Menyalurkan dana kepada masyarakat
Bank akan menyalurkan dananya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman, melalui penyaluran dana tersebut berupa pendapatan bunga kegiatan penyaluran

dana ini memberikan pendapatan yang cukup besar bagi bank namun mendapatkan pinjaman dana dari bank (kredit) maka nasabah harus memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh bank

- Pelayanan jasa perbankan
Selain simpanan, bank juga menawarkan berbagai produk pelayanan jasa perbankan kepada nasabah. Produk pelayanan jasa perbankan tersebut antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindah bukuan, penagihan surat-surat berharga, kliring, *Letter of Credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa lainnya. Seiring dengan arus globalisasi saat ini, maka pelayanan jasa yang cepat dan akurat merupakan suatu kebutuhan yang utama. Terutama bagi mereka yang bergerak dalam bidang bisnis dan berpacu dengan waktu, untuk memenuhi tuntutan kebutuhan nasabah tersebut, maka saat ini banyak sektor perbankan yang berlomba untuk melakukan inovasi dan meningkatkan teknologi serta sistem informasi demi memberikan kepuasan pelayanan kepada nasabah.

Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Wijaya, 2018). Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya (Ulfah & Massora, 2021). Proses kebijakan dan prosedur yang dirancang oleh manajemen untuk memastikan pelaporan keuangan yang andal dan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang berlaku (Sufriyanti, 2018) (Fitria et al., 2021).

Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi asset atau kekayaan perusahaan dari segi bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan (peraturan hukum/undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi atau dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan organisasi/perusahaan Menurut (Hery, 2013).

Menurut Mulyadi (2016:129), bahwa tujuan sistem pengendalian internal adalah:

- Menjaga aset organisasi, keberadaan pengendalian internal dalam perusahaan, melindungi *asset* atau kekayaan dalam perusahaan baik secara fisik maupun non fisik, tidak rawan bagi pencuri, disalah gunakan, atau dihancurkan.
- Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, tujuan dengan adanya pengendalian intern untuk memberikan suatu jaminan dalam proses pengelolaan data akuntabsi yang menghasilkan sebuah informasi keuangan yang baik
- Mendorong efesiensi, dengan adanya pengendalian intern dalam perusahaan, dan mencegah terjadinya duplikasi usaha yang sebenarnya tidak diperlukan dan pemakaian sumber daya yang tidak efisien dalam perusahaan.
- Menjaga aset organisasi, keberadaan pengendalian internal dalam perusahaan, melindungi *asset* atau kekayaan dalam perusahaan baik secara fisik maupun non fisik, tidak rawan bagi pencuri, disalah gunakan, atau dihancurkan.
- Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, tujuan dengan adanya pengendalian intern untuk memberikan suatu jaminan dalam proses pengelolaan data akuntabsi yang menghasilkan sebuah informasi keuangan yang baik

- Mendorong efisiensi, dengan adanya pengendalian intern dalam perusahaan, dan mencegah terjadinya duplikasi usaha yang sebenarnya tidak diperlukan dan pemakaian sumber daya yang tidak efisien dalam perusahaan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank maupun pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir 2017).

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan terlebih dahulu (Maiwati & Widayati, n.d.).

Kredit adalah suatu yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendorong dan melancarkan aktivitas perdagangan, kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, bank membiayai kredit dalam pembelian rumah. Pihak bank sebagai kreditur sementara nasabah penerima kredit (debitur) (Alanshari & Marlius, 2018).

Menurut Mulyadi (2016) Prinsip-Prinsip Pemberian kredit terbagi menjadi 5 diantaranya sebagai berikut:

- *Character* adalah Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit harus dapat dipercaya yang tercermin dari latar belakang nasabah baik latar belakang yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: Cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya.
- *Capacity* adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
- *Capital* adalah penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- *Condition* adalah kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang harus dinilai sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek usaha dari sektor yang dijalankan oleh nasabah juga harus dinilai. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

3. METODE PENELITIAN

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2018). Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini meliputi pegawai BRI Cabang Sinjai Unit Tassililu yaitu kepala unit, mantri, *costumer service*. Sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2018). Sampel penelitian yaitu laporan tentang pemberian kredit dan dokumen- dokumen yang mengandung 3 tahun terakhir, yakni 2020, 2021, 2022 yang merupakan proses pemberian kredit usaha rakyat (KUR).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

- **Prosedur pemberian kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sinjai Unit Tassililu**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan penelitian secara langsung dikantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu yang dilakukan pada tanggal 7 Juli serta hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Unit, Mantri dan, *Customer Service*, maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut

- **Pengajuan berkas-berkas**

Pada tahap pengajuan berkas-berkas calon nasabah mengajukan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara tertulis kepada pihak BRI Unit Tassililu. Kemudian dibantu oleh *customer Service* untuk mengisi formulir permohonan calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sudah disediakan oleh pihak bank, kemudian ditanda tangani oleh calon debitur.

Calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) diharuskan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam hal pengajuan permohonan Kredit Usaha Rakyat (KUR) diperkenalkan sebagai kredit yang mudah didapat, maka syarat-syarat yang diterapkan sangat sederhana. Persyaratan administratif bagi calon-calon antar lain menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, fotokopi Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Usaha, foto lokasi rumah, foto tempat usaha, foto calon debitur dan titik koordinat rumah calon debitur.

- **Pemeriksaan berkas pinjaman**

Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika belum lengkap atau cukup, maka calon debitur diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka permohonan kreditnya dapat dibatalkan. Secara nyata, bagi calon debitur sudah mempunyai usaha yang produktif minimal sudah berjalan selama 6 bulan berdasarkan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan Mantri dan dituangkan dalam formulir Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam menilai suatu permohonan kredit yaitu bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis. Hal ini berlaku kepada calon debitur yang bermohon, nasabah yang kreditnya telah lunas 6 bulan terakhir, kredit yang telah

lunas tapi putus, yang menerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), sosialisai kepada kelompok tani, kunjungan *door to door* dengan membawa brosur dan referal agen BRILINK.

○ **Wawancara 1**

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Kegiatan wawancara yang dilakukan oleh mantri BRI Unit Tassililu menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan usaha calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), tujuannya adalah untuk menganalisis apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak. Menanyakan tentang keuntungan dari usaha calon debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar pinjaman.

○ **On the Spot**

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I, kegiatan tersebut dilakukan mantri akan meninjau dan memastikan tempat tinggal calon debitur, mantri memastikan usaha yang dijalankan calon debitur, mencocokkan fotokopi bukti diri/identitas lain sesuai dengan aslinya.

○ **Wawancara II**

Merupakan bagian perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Apabila pada saat dilakukan *on the spot* ke lapangan dan diketahui bahwa calon debitur telah pindah tempat tinggal dan tidak sesuai dengan alamat yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka calon debitur harus membuat surat keterangan domisili terlebih dahulu. Apabila pasangan calon debitur telah meninggal dunia maka harus membuat surat keterangan kematian terlebih dahulu dan apabila pasangan calon debitur tidak ada ditempat atau keluar daerah maka harus membuat Surat Keterangan tidak ada di tempat pada Kantor Lurah atau Desa.

○ **Keputusan Kredit**

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit ditentukan oleh Kepala Unit setelah data nasabah sudah di input oleh mantri beserta dengan usulan dari *RPC (Repayment Capacity)*. Pihak BRI Unit Tassililu akan memberitahukan kepada calon debitur untuk mengkonfirmasi kembali beberapa hari menurut hari yang telah ditentukan oleh pihak bank setelah pengajuan permohonan kredit. Biasanya pemberian putusan dilakukan tiga sampai lima hari setelah pendaftaran permohonan KUR. Pada BRI Unit Tassililu sebelum pemberian putusan kredit, Kepala Unit Tassililu wajib meneliti dan memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan atau yang mendukung pemberian keputusan kredit masih berlaku, lengkap, sah dan berkekuatan hukum.

○ **Penandatanganan akad kredit/ perjanjian lainnya**

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. Berkas atau kelengkapan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Surat Pengakuan Hutang (SPH), sebelum menandatangani berkas pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR), *Costumer Service* harus memastikan bahwa dokumen-dokumen berhubungan dengan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah ditandatangani oleh debitur sebagai bukti persetujuan debitur. Setelah itu, *Costumer Service* meminta debitur membaca dan memahami Surat Pengakuan

Hutang (SPH) dan menandatangani Surat Pengakuan Hutang (SPH). Selanjutnya diserahkan ke Kepala Unit untuk diperiksa.

Selain itu Kepala Unit memeriksa berkas penting tentang kebenaran dan kelengkapan pengisian berkas KUR untuk dicocokkan dengan syarat yang disebutkan dalam putusan kredit, setelah yakin maka kepala unit membutuhkan tanda tangan sebagai persetujuan flat bayar, setelah itu kuitansi diserahkan kepada *teller* dan berkas diserahkan kepada *costumer service*.

- **Realisasi Kredit**

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di *customer service* pada bank. Setiap dana pencairan masuk, debitur tidak boleh menerima uang secara tunai tetapi akan masuk ke rekening tabungan debitur. Jadi pada saat kepala unit memutus kredit maka akan diterbitkan buku tabungan. Jadi, secara otomatis dana akan masuk ke rekening tabungan debitur. *Customer service* akan memberikan tanda tangan dan menjelaskan kembali kepada debitur terkait Surat Pengakuan Hukum (SPH).
- **Penyaluran/ Penarikan**

Penyaluran/Penarikan adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Penarikan uang bisa dilakukan melalui *teller* dengan menggunakan buku tabungan atau melalui mesin *Automatic Teller Maschine (ATM)* dengan menggunakan kartu ATM ataupun dengan melalui agen BRI LINK.
- **Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Sinjai Unit Tassililu**
 - **Pengajuan Berkas Pinjaman**

Adapun syarat pendaftaran kredit usaha rakyat yaitu dokumen yang harus dipenuhi dalam permohonan kredit usaha rakyat (KUR) antara lain fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu keluarga (KK), surat izin usaha dari kelurahan, mempunyai UMKM yang berjalan lebih dari setahun dan punya pendapatan tetap. Petugas yang bertanggungjawab atas permohonan kredit usaha rakyat (KUR) adalah *customer service*.

Pendaftaran harus dilakukan di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu setiap jam kerja. *Customer service* menerima pengajuan permohonan kredit dari calon debitur dan memeriksa kelengkapan dokumen syarat calon debitur antara lain fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat izin usaha, serta tanda bukti agunan objek yang dibiayai misalnya BPKB kendaraan bermotor atau surat Hak Milik. *Customer service* menyiapkan Formulir Permohonan Kredit (FPK) yang diberikan kepada debitur untuk di lengkapi dan di isi tentang data debitur, besarnya plafond kredit serta maksud dan tujuan kredit.
 - **Pemeriksaan Berkas Pinjaman**

Memproses data calon debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID) untuk memastikan calon debitur tidak terikat dengan kredit program pemerintah lainnya. Jika terikat kredit dengan program lain maka dokumen permohonan kredit di kembalikan ke debitur jika tidak terikat maka permohonan kredit dilanjutkan, Jika tidak terikat dengan kredit lain selanjutnya mantri

untuk melakukan wawancara dan peninjauan lokasi ke tempat usaha debitur.

o **Wawancara / On the spot**

Merupakan penyediaan kepada calon debitur kegiatan wawancara I dilakukan oleh mantri untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan usaha calon debitur, menanyakan berapa keuntungan dari usaha calon debitur tujuannya adalah apakah calon debitur mampu mengembalikan pinjaman atau tidak. Setelah dilakukan wawancara maka mantri dan kepala unit melakukan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha atau jaminan oleh calon debitur kemudian dicocokkan oleh hasil wawancara dan berkas pinjaman.

o **Putusan Kredit**

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diterima atau ditolak petugas yang berwenang dalam pelaksanaan putusan kredit adalah kepala unit, kepala unit menerima dokumen hasil analisis kredit dan permohonan kredit dari mantri kemudian dilakukan rekomendasi ulang sebelum mengambil keputusan kredit jika hasil keputusan negatif (kredit di tolak) maka semua dokumen permohonan kredit di kembalikan kepada calon debitur. Jika hasil keputusan positif maka kepala unit melakukan approve pada LAS, semua dokumen kredit disetujui dikembalikan ke bagian mantri untuk di verifikasi ulang, ketika mantri menerima dokumen kredit yang telah disetujui dari kepala unit maka mantri akan memanggil calon debitur untuk melakukan penandatanganan akad kredit dan pencairan kredit.

o **Pencairan Kredit**

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit. Berkas atau kelengkapan pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Surat Pengakuan Hutang (SPH), kuitansi pinjaman untuk pencairan kredit sebanyak 3 lembar dan di tanda tangani oleh debitur, kepala unit dan *customer service*, SPH lembar pertama diserahkan ke debitur, lembar kedua diserahkan ke mantri untuk di arsip dan kuitansi pinjaman diserahkan ke teller untuk pencairan kredit, Penarikan uang bisa dilakukan melalui *teller* dengan menggunakan buku tabungan atau melalui mesin *Automatic Teller Maschine* (ATM) dengan menggunakan kartu ATM ataupun dengan melalui agen BRI LINK.

Tabel 1. Perbandingan pemberian kredit berdasarkan Kasmir (2014), pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia unit Tassililu dan Standar Operasional Prosedur SOP

Kasmir (2014:10)	PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tassililu	Standar Operasional Prosedur (SOP)	Prosedur Pemberian Kredit	Keterangan
Pengajuan permohonan kredit yang dituangkan dalam bentuk proposal	PT. Bank Rakyat Indonesia dalam pengajuan permohonan kredit dilakukan secara tertulis yang dibantu oleh <i>customer service</i> untuk mengisi formulir permohonan kredit	Pendaftaran permohonan kredit dilakukan di kantor BRI Unit tassililu setiap jam kerja melalui <i>customer services</i>	Pengajuan Berkas Pinjaman	Tidak Sesuai dengan teori kasmir sedangkan menurut SOP Prosedur pemberian kredit sudah sesuai

Pemeriksaan setiap berkas pinjaman wajib dilakukan sebelum dilakukan putusan kredit	PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Tassililu memeriksa setiap berkas pinjaman secara detail di setiap pengajuan pemberian kredit usaha rakyat, sebelum dilakukan wawancara dan <i>on the spot</i> .	Pemeriksaan berkas pinjaman akan di proses oleh <i>customer service</i> untuk memeriksa data calon debitur ke sistem Informasi debitur (SID) sebelum dilakukan proses wawancara dan <i>on the spot</i> .	Pemeriksaan berkas pinjaman	Sesuai
Sebelum ke tahap putusan kredit maka dilakukan verifikasi berkas terlebih dahulu	Tahap Verifikasi berkas dilakukan setelah wawancara dan <i>on the spot</i> apakah berkas pinjaman sudah sesuai dan sudah di terima	Setelah melakukan wawancara dan <i>on the spot</i> maka akan dilakukan verifikasi berkas pinjama yaitu memeriksa berkas pinjman apakah sudah sesuai dan sudah di sahkan oleh kepala unit	Tahap Verifikasi kredit	Sesuai
Ketika putusan pemberian kredit diberikan maka dipersiapkan administrasi, untuk pencairan dana yang akan dilakukan oleh calon debitur melalui buku tabungan atau <i>Automatic Teller Maschine (ATM)</i> .	PT. Bank Rakyat Indonesia putusan kredit yaitu: ketika berkas pengajuan dianggap sudah lengkap dan benar berdasarkan syarat-syarat pemberian kredit dan sudah diterima oleh kepala unit maka calon debitur melakukan penandatanganan SPH, penarikan dana akan dilakukan melalui buku tabungan atau <i>Automatic Teller Maschine (ATM)</i> .	Pada tahap putusan kredit yaitu : ketika kredit diterima maka calon debitur dipanggil ke kantor untuk melakukan penandatanganan SPH sesuai dengan jumlah plafon pinjaman, penarikan dana akan dilakukan melalui teller atau <i>Automatic Teller Maschine (ATM)</i> .	Putusan pemberian kredit	Sesuai

4.2. Pembahasan

Setiap bank masing-masing memiliki prosedur dan pengendalian internal tersendiri dalam memberikan kredit kepada nasabah dan mengatasi permasalahannya secara umum pemberian kredit kepada nasabah dan mengatasi permasalahannya. Secara umum pemberian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sinjai Unit Tassililu sudah baik. Walaupun demikian masih ada kekurangan yang disebabkan baik itu dari internal perusahaan maupun dari debitur/calon debitur. Adapun kelemahan-kelemahan yang terjadi dari hasil penelitian yang saya lakukan sebagai berikut:

- Kelemahan yang disebabkan oleh faktor intern bank
 - Adanya pengaruh negosiasi antara debitur/calon kepada petugas bank sehingga mempengaruhi hasil analisis dan evaluasi agar hasilnya sesuai dengan keinginan kreditur/calon kreditur.

- Terkadang pemberian kredit lebih besar dari kebutuhan debitur/calon debitur dan tidak sesuai dengan tujuannya.
- Kelemahan yang disebabkan oleh faktor debitur
 - Usaha nasabah yang menurun
 - Terlalu memaksakan kehendak untuk mengambil kredit besar
 - Pengambilan kredit tidak sesuai kebutuhan nasabah

Dalam rangka pengawasan pihak bank kepada debitur, maka setiap bank akan melakukan kontrol yang dapat meminimalisasi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi. Sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem pengawasan terhadap proses kerja di Bank yang terintegritas pada setiap unit kerja serta saling melengkapi antara satu unit kerja dengan unit kerja lainnya, sehingga keseluruhan unit bisa berjalan sesuai dengan sistem berlaku dan fungsinya masing-masing.

Sementara itu, pengendalian Internal adalah pengendalian yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya. Cakupan dari pengendalian ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan, dan lain-lainnya. Di dalam sistem pengendalian internal terdapat 5 komponen/unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu:

- Lingkungan pengendalian adalah dasar untuk semua komponen pengendalian *intern*, menyediakan disiplin dan struktur dalam hal ini PT BRI Unit Tassililu selalu menerapkan kebijakan-kebijakan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan dari aturan yang berlaku dan akan memberikan sanksi penyimpangan dari aturan yang berlaku dan akan memberikan sanksi untuk setiap karyawan yang melakukan pelanggaran. Contohnya seorang mantri yang memungut biaya kepada kreditur atas pencairan kredit yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar terciptanya organisasi yang sehat PT. BRI juga senantiasa dilakukan pelatihan guna meningkatkan kemampuan kerja untuk karyawan. Setiap karyawan akan diberikan pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing agar bisa melakukan tugasnya secara efektif.
- Penaksiran risiko adalah entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Setiap organisasi pasti memiliki risiko pada PT BRI Unit Tassililu ada berbagai risiko yang dapat terjadi dalam aktivitas yang terjadi setiap harinya. Maka PT BRI Unit Tassililu akan berusaha melakukan berbagai upaya untuk mengurangi atau mencegah risiko yang akan terjadi. Berbagai hal terjadinya seperti karyawan baru yang ditempatkan kurang berkompeten sehingga terjadinya kelambatan dalam proses pencairan kredit.
- Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. PT BRI Unit Tassililu selalu menekankan kepada karyawannya agar bekerja sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang berlaku, dengan memperhatikan tugas dan wewenang masing-masing. Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tassililu selaku orang yang bertanggung jawab dan bertugas untuk mengawasi setiap kinerja karyawan yang bertugas di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tassililu kepala unit akan memberikan laporan kepada kepala cabang untuk setiap bulannya tentang pencapaian target yang di dapatkan perbulannya.
- Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang untuk melaksanakan

tanggung jawab mereka. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua personel yang terlibat dalam prosedur kredit ataupun aktivitas lainnya mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Komunikasi juga perlu dilakukan apabila terjadi masalah yang tidak diinginkan, dan apabila terjadi masalah di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tassililu maka kepala unit bisa mengkomunikasikan langsung kepada cabang agar mendapatkan solusi dan perintah tindakan.

- Pemantauan merupakan proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan ini akan selalu dilakukan dan memberikan evaluasi pada periode tertentu. Pemantauan harus dilakukan secara teratur dan menyeluruh untuk tiap-tiap bagian sehingga jika ada kelemahan bisa diperbaiki dengan secepatnya sama halnya yang dilakukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia Unit Tassililu akan selalu dilakukan evaluasi kinerja karyawan ataupun perusahaan itu sendiri.

Prosedur pemberian kredit KUR adalah urutan atau tahapan pemberian kredit yang dilaksanakan mulai dari tahap pengajuan berkas-berkas sampai putusan kredit. Tahap-tahap tersebut dilakukan dalam rangka menghindari dan meminimalisasi timbulnya kredit macet. Maka penulis dapat mengemukakan bahwa proses pemberian KUR dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan standar operasi prosedur (SOP) yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan melakukan penelitian secara langsung di kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu serta hasil wawancara yang telah dilakukan dan memantau calon debitur melalui dokumen yang telah dilampirkan seperti, surat pengakuan hutang, form permohonan pinjam, form putusan dan pencairan pinjaman. Sistem pengendalian internal pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia sudah efektif penerapannya. Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal di tiap-tiap kantor unit PT. Bank Rakyat Indonesia telah efektif penerapannya. Hal ini digambarkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ulfa & Massora, (2021) ini berarti bahwa tidak hanya pada kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu yang sistem pengendalian internal efektif penerapannya.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian terkait Analisis Pengendalian Internal Terhadap Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu sudah efektif dan dapat dibuktikan berdasarkan teori menurut Kasmir (2014) tahap-tahap pemberian kredit adalah sebagai berikut: pengajuan berkas-berkas, pemeriksaan berkas pinjaman, wawancara I, *on the spot*, I, wawancara II, putusan kredit, penandatanganan akad/perjanjian lainnya, realisasi kredit, penyaluran/penarikan dana, telah terpenuhi dan efektif pada PT Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu dalam hal pemberian Kredit Usaha Rakyat. Pemberian kredit usaha rakyat PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan kapasitas dan fasilitas yang diberikan dalam prosedur pemberian kredit usaha rakyat cukup mudah begitu juga dengan proses administrasi, serta adanya komunikasi yang baik antara pihak bank dengan masyarakat. Sehingga berdasarkan teori Kasmir yang membahas tentang prosedur pemberian kredit, maka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Sinjai Unit Tassililu, telah mengimplementasikan teori tersebut dengan dasar-dasar prosedur yang telah ditentukan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu, beberapa kesimpulan dapat diambil. Pertama, dari analisis data, pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank tersebut, jika dinilai berdasarkan teori Kasmir, menunjukkan ketidaksesuaian pada tahap pengajuan berkas pinjaman. Namun demikian, seluruh proses tetap berada dalam koridor Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Kedua, secara keseluruhan, pemberian kredit usaha rakyat di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai Unit Tassililu berjalan dengan baik. Fasilitas dan kapasitas yang disediakan dalam prosedur pemberian KUR dianggap cukup mudah, termasuk dalam aspek administrasi. Komunikasi yang efektif antara pihak bank dan masyarakat juga menjadi poin positif dalam proses ini.

Walaupun terdapat temuan ketidaksesuaian pada tahap tertentu, namun secara keseluruhan, proses pemberian kredit usaha rakyat di bank ini dianggap berhasil. Hal ini memberikan fasilitas yang memadai bagi peminjam dan menjaga komunikasi yang baik dengan masyarakat. Temuan ini dapat dijadikan landasan untuk perbaikan lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas proses pemberian kredit di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Alanshari, F., & Marlius, D. (2018). Prosedur Pemberian Kredit KPR Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Pembantu Bukittinggi. *Akademi Keuangan Dan Perbankan Padang, 2014*, 1–11.
- Ardillawati. (2019). Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kanrung Cabang Sinjai Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai.
- Fauzany, R., & Haryono, R. (2021). Analisis Pemberian Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Bandung Citarum Tbk. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 2, 97–106.
- Fitriyani, T. I. dan Z. (2020). Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). *Edisi Februari 2021*, 23–32.
- Fitria, F., Ruslan, R., & Mapeasse, M. Y. (2021). Application of E-Learning Based on Enriched Virtual Model in the Subject Database. *International Journal of Environment, Engineering and Education*, 3(1), 32–40. <https://doi.org/10.55151/ijeedu.v3i1.47>
- Hamzah, H., & Sangkala, M. (n.d.). *Pengaruh Ukuran dan Likuiditas Perusahaan terhadap Struktur Modal*.
- Hery. (2013). Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pemberian Kredit Pada KSP Kopdit Guru Kelubagoli Kecamatan Kelubagoli. 1(1), 1–15.
- Kadir W., A., S. A., Purwanto, R. H., & Poedjirahajoe, E. (2012). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 19(1), 1–11.
- Kasmir (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Erlangga Pers
- Maiwati, S., & Widayati, R. (n.d.). *Bank Negeri Cabang Sijunjung Sepni Maiwati Ratna Widayati*. 1–12.
- Mulyadi, D. (2016). Analisis Manajemen Kredit Dalam Uoaya Meningkatkan Kredit Bermasakah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang). *Jurnal Manajemen & Bisnis Vol, 1 No, 2, 2016*

- Mulyadi, (2016). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nulhakim, L. (2016). Profitabilitas Pada PT Bank BJB Tbk. 10.
- Nurfika, andi ika. (2016). Sistem Pengendalian Internal Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Macet Pda PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO).Tbk Kantor Cabang Sinjai. 1–23.
- Rijal, A., Nuraisyiah, N., & Samsinar, S. (2020). Pendirian Koperasi Sekolah UPT SMKN 1 Pangkep. *Seminar Nasional Pengabdian*, 1–3.
- Sufriyanti, F. (2018). Peranan Sistem Aplikasi FAST Terhadap Efektifitas Pengendalian Internal Piutang Dagang (Studi Kasus Pada PT . KEA Panelindo). 6(1).
- Sugiono (2021). Populasi dan Sampel. Cv Media Sains Indonesia.
- Ulfah, L., & Massora, A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Pemberian Kredit di BPR Harapan Saudara. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 93–109.
- Widodo,D. (2017). Metodologi Penelitian. (1). Jakarta: Rajawali Pers.